

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Pendidikan merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan dan memperbarui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena dinilai dapat menghasilkan individu yang produktif dalam memajukan sebuah bangsa. Penguatan pendidikan dipandang utama karena memberikan peran yang besar untuk mencapai kemajuan sebuah negara di berbagai aspek kehidupan. Maka, pendidikan merupakan hal yang utama untuk manusia dan tidak dapat dikesampingkan, terutama dalam menghadapi dunia yang penuh persaingan. (Yusup *et al*, 2019).

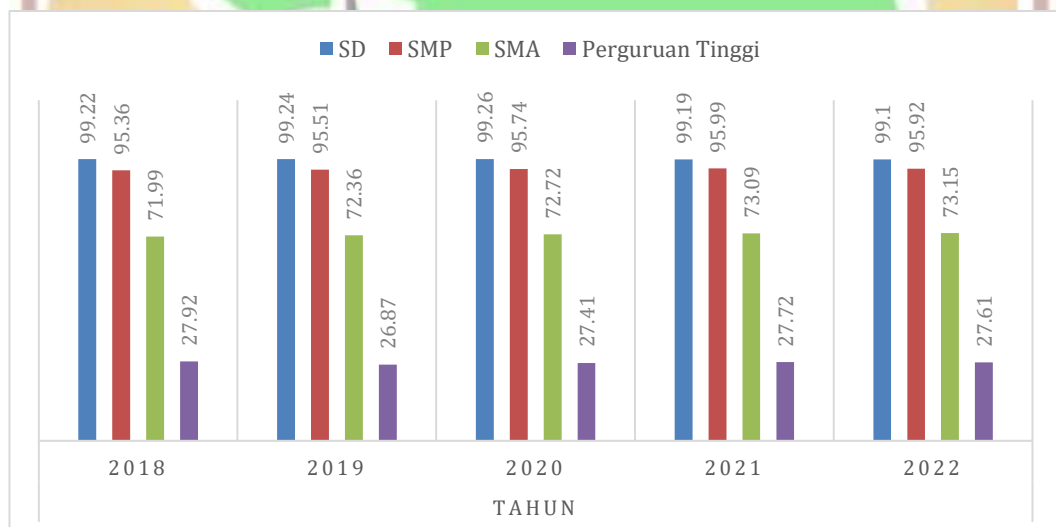
Pendidikan dianggap sebagai pilar utama perubahan menuju perbaikan yang lebih unggul, untuk mewujudkan impian luhur bangsa Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat di masa depan. Sebuah negara yang ingin meningkatkan taraf hidup harus memulai dengan memperbaiki sistem pendidikan harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Tujuannya adalah agar individu yang dihasilkan memiliki kompetensi yang unggul (Nikmah *et al*, 2020).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesadaran politik, kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepedulian terhadap lingkungan. Negara mengutamakan alokasi anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah setidaknya sebanyak 20% dialokasikan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan pendidikan nasional. Akan tetapi, ketimpangan pendidikan antar kelompok masyarakat masih tetap ada hingga kini. Rumah tangga yang lebih sanggup secara finansial cenderung memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang kurang sanggup secara finansial. Ini dikarenakan tingginya biaya yang harus dibayarkan oleh rumah tangga untuk mendukung aktivitas pendidikan (Mulyani *et al*, 2023).

Tingkat partisipasi pendidikan di berbagai negara berkembang tetap menjadi perhatian meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperluas akses pendidikan (Villa, 2018). Upaya-upaya tersebut mencakup pembangunan sekolah baru, penyediaan pendidikan dasar gratis, dan pemberian akses pendidikan universal. Indonesia, sebagai salah satu negara dalam proses pembangunan, juga masih berusaha untuk meningkatkan tingkat keterlibatan pendidikan di kalangan masyarakatnya.

Tingkat partisipasi pendidikan dapat dijelaskan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menggambarkan proporsi penduduk dalam kelompok usia tertentu yang mengikuti pendidikan dibandingkan dengan total penduduk dalam kelompok usia tersebut (BPS, 2022). Tujuan utama perhitungan APS adalah untuk mendapatkan informasi berapa banyak penduduk usia sekolah yang menggunakan fasilitas pendidikan.

Gambar 1. 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Sekolah di Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024, data diolah

Grafik 1.1 menggambarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2018 hingga 2022, mencakup Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi. Secara umum, APS untuk jenjang SD dan SMP menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi namun tidak stabil, dengan APS SD berkisar antara 99.1% hingga 99.26% dan APS SMP antara 95.36% hingga

95.99%. Hal ini mencerminkan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Indonesia, yang memastikan hampir semua anak di usia sekolah dasar dan menengah pertama bersekolah.

Pada jenjang SMA, APS sedikit lebih rendah, berkisar antara 71.19% hingga 73.15%, menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan partisipasi siswa di tingkat pendidikan menengah atas. Selain itu, APS untuk Perguruan Tinggi, menunjukkan penurunan dari 27.92% pada tahun 2018 menjadi 27.61% pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan perlunya upaya pemerintah dan berbagai institusi dalam mendorong akses dan partisipasi di pendidikan tinggi, meskipun masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai partisipasi yang lebih luas. Terdapat tantangan dalam meningkatkan partisipasi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang perlu diatasi untuk mencapai pemerataan pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Rendahnya tingkat partisipasi dalam pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti keterbatasan ekonomi, ketidakmerataan akses pendidikan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi. Banyak keluarga di Indonesia masih dalam kondisi ekonomi yang kurang memadai, sehingga biaya kuliah dan biaya hidup menjadi beban yang berat. Selain itu, akses ke perguruan tinggi yang baik seringkali terbatas di daerah perkotaan, sementara di daerah pedesaan atau terpencil, fasilitas pendidikan masih sangat minim. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang manfaat jangka panjang dari pendidikan tinggi juga menyebabkan banyak siswa memilih untuk langsung bekerja setelah lulus sekolah menengah. Faktor-faktor ini berkontribusi pada rendahnya angka partisipasi dalam pendidikan perguruan tinggi, menghambat pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik di Indonesia (Suryadarma *et al*, 2006).

Tingginya biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia merupakan salah satu penghalang utama bagi banyak siswa untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi meliputi biaya pendaftaran, uang semester, biaya praktikum, hingga biaya buku dan perlengkapan lainnya. Selain itu, biaya hidup di kota-kota besar tempat banyak universitas terkemuka berada juga menambah beban bagi mahasiswa dan keluarganya. Keluarga dengan

kondisi ekonomi kurang mampu seringkali tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, meskipun ada beberapa program beasiswa yang tersedia. Kurangnya bantuan keuangan yang memadai dan terbatasnya jumlah beasiswa yang tersedia menambah kesulitan bagi siswa untuk mengakses pendidikan tinggi.

Tidak seluruh warga Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Maka dari itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap hal ini. Kemiskinan dan terbatasnya kemampuan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu merupakan dua hal yang saling terkait. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Kendala ekonomi dalam keluarga menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi minimnya tingkat partisipasi pendidikan (Nurokhmah, 2021).

Kemiskinan dan kesulitan dalam memperoleh pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang saling terkait. Keduanya memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat, sehingga perlu tindakan yang komprehensif untuk mengatasinya. Meskipun tantangannya besar, pemerintah tetap gigih dan tidak menyerah dalam upaya mencapainya. Kemiskinan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melanjutkan pendidikan sehingga banyak di antara mereka memutuskan untuk berhenti sekolah demi meringankan beban hidup sehari-hari (Nikmah *et al*, 2020).

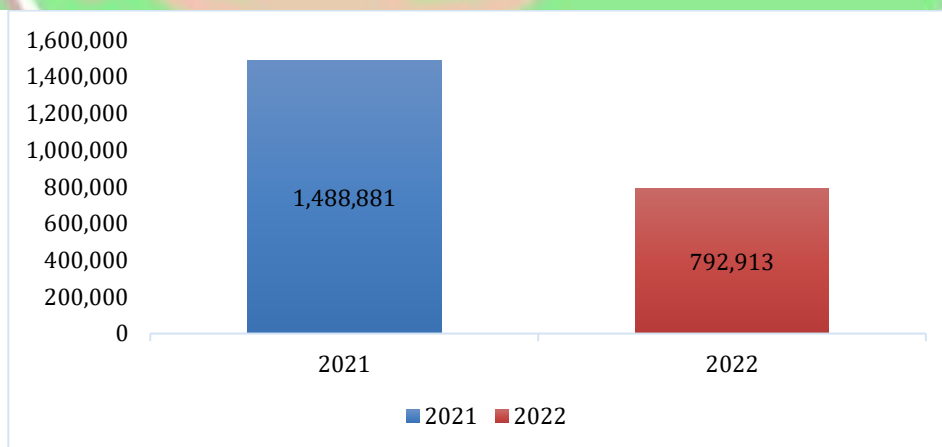
Guna mewujudkan cita-cita bangsa dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul berawal dari fondasi pendidikan yang kokoh. Persiapan ini harus dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu anak-anak usia sekolah. Negara memiliki peran fundamental dalam memastikan kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa untuk mengenyam pendidikan berkualitas (Purnama & Izzatusolekha, 2023).

Untuk mendukung hal ini, pemerintah Indonesia memiliki berbagai program untuk membantu biaya pendidikan dan memastikan akses yang lebih merata bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Salah satu program utama adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan bantuan tunai untuk menutupi biaya pendidikan seperti uang sekolah, buku, dan perlengkapan belajar. Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga berperan dalam membantu biaya pendidikan dengan

memberikan bantuan tunai dan akses ke kebutuhan sekolah. Selain itu, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Bidikmisi menyediakan dukungan finansial untuk mahasiswa berprestasi yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Program Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) juga memberikan beasiswa untuk pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri bagi mahasiswa yang berprestasi dan memerlukan bantuan. Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, serta mendorong mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar bagi semua siswa di Indonesia.

Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau memiliki keterbatasan keuangan. Mereka harus telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur masuk perguruan tinggi, seperti SNBP, SNBT, atau jalur mandiri, dan diterima di Program Studi yang telah terakreditasi secara resmi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi yang relevan. Selain itu, penerima KIP Kuliah harus memiliki potensi akademik yang baik, yang ditunjukkan melalui nilai rapor, hasil ujian, atau prestasi akademik lainnya.

Gambar 1. 2 Jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah



Sumber: Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

Laporan kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) menunjukkan adanya perbedaan besar dalam jumlah penerima beasiswa KIP-Kuliah antara tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, sebanyak 1.488.881 mahasiswa mendapatkan beasiswa KIP-Kuliah, sedangkan pada tahun 2022 angkanya menurun drastis menjadi hanya 792.913 mahasiswa. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Puslapdik pada tahun 2021 untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut memberikan Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP kepada 347.113 mahasiswa, yang mempengaruhi alokasi dan distribusi beasiswa KIP-Kuliah.

Penurunan jumlah penerima beasiswa ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan program pembiayaan pendidikan di Indonesia. Meski demikian, upaya terus dilakukan agar program KIP-Kuliah tetap dapat menjangkau mahasiswa yang paling membutuhkan, dengan harapan program ini terus mendukung perluasan akses pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Adanya program-program seperti PEN juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dalam menghadapi perubahan situasi ekonomi. Ke depannya, evaluasi dan penyesuaian akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain diberikannya program bantuan, partisipasi pendidikan tinggi turut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik demografi serta karakteristik sosial ekonomi keluarga. Jika dilihat dari segi pendidikan kepala rumah tangga (KRT), dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan KRT, semakin tinggi pula persentase anak yang bersekolah. Ini tidak mengherankan karena KRT yang memiliki pendidikan tinggi cenderung menginginkan agar pendidikan tinggi juga diperoleh oleh anak-anak atau anggota keluarganya, setidaknya setara dengan pendidikan yang dimiliki. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk memperluas wawasan seseorang. Pemikiran yang lebih maju dan sikap yang positif terhadap peran pendidikan umumnya dimiliki oleh individu dengan pendidikan tinggi (Utami & Wicaksono, 2019).

Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat partisipasi pendidikan adalah jumlah anggota rumah tangga. Besar kecilnya struktur rumah tangga dalam suatu rumah tangga digambarkan oleh jumlah saudara. Dalam penelitian lain diketahui bahwa rumah tangga yang besar atau memiliki jumlah anggota yang banyak cenderung menjadi asal individu yang berhenti sekolah. Jumlah anak dalam suatu rumah tangga disebutkan memiliki hubungan negatif dengan ketersediaan sumber daya untuk dibagikan (Al-Samarrai & Peasgood, 1998). Namun, ada kemungkinan juga bahwa jumlah anak yang semakin meningkat dapat menurunkan jumlah tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap anak.

Dilihat dari tingkat kesejahteraannya, persentase partisipasi sekolah yang lebih tinggi ditunjukkan oleh penduduk dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki kesejahteraan rendah atau sedang. Hal ini terkait dengan biaya pendidikan yang tidak murah, meskipun banyak sekolah yang membebaskan biaya SPP untuk murid-muridnya. Namun, penting untuk diingat bahwa biaya-biaya lainnya juga harus dikeluarkan untuk pendidikan, tidak hanya biaya SPP sekolah. Sementara itu, jika dilihat dari karakteristik tempat tinggal, persentase penduduk yang bersekolah lebih banyak di perkotaan. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang bersekolah cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki, meskipun perbedaannya tidak terlalu mencolok (Mulyani *et al*, 2023).

Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan memberikan bantuan biaya hidup dan pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, KIP berusaha mengurangi kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dan hidup, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya perlengkapan sekolah atau transportasi.

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saling terkait dalam upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Indonesia. PIP memberikan bantuan

tunai langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk menutupi biaya pendidikan seperti uang sekolah, buku, dan perlengkapan belajar. Sebaliknya, KIP berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat. Dengan kata lain, KIP adalah mekanisme yang memungkinkan mahasiswa menerima berbagai bentuk bantuan pendidikan, termasuk yang disediakan oleh PIP. KIP juga berperan sebagai identitas yang menghubungkan mahasiswa dengan berbagai bantuan pendidikan. Kombinasi dari kedua program ini bertujuan memastikan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa terkendala masalah finansial (Kemendikbud, 2021).

Dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP), diharapkan partisipasi siswa di sekolah-sekolah Indonesia akan meningkat secara signifikan. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang sering menjadi hambatan utama bagi banyak keluarga. Melalui PIP, diharapkan siswa yang sebelumnya berisiko putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dapat melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang bermutu.

Sebagai lanjutan dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, muncul pula Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), yang secara khusus ditujukan bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. KIP Kuliah memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi tanpa terbebani oleh biaya kuliah yang tinggi. Dengan adanya KIP Kuliah, diharapkan semakin banyak lulusan SMA atau sederajat yang terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.

Bantuan yang diberikan oleh KIP Kuliah mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, dan kebutuhan akademik lainnya, sehingga mahasiswa dapat fokus pada studi mereka tanpa harus khawatir mengenai masalah finansial. Ini sejalan dengan

tujuan PIP yang berusaha memastikan bahwa semua anak di Indonesia, terlepas dari latar belakang ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi. Dengan demikian, KIP Kuliah tidak hanya mendukung peningkatan partisipasi di sekolah, tetapi juga berperan penting dalam mencetak generasi muda yang berpendidikan tinggi dan siap bersaing di dunia kerja.

Melalui integrasi antara PIP dan KIP Kuliah, pemerintah berupaya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, dimana setiap anak memiliki peluang yang adil untuk meraih impian mereka, tanpa terbatas oleh kondisi ekonomi keluarga. Dengan kedua program ini, diharapkan kesenjangan dalam pendidikan dapat diminimalkan, sehingga semakin banyak anak Indonesia yang dapat mengakses pendidikan berkualitas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara yang lebih maju.

Investasi dalam modal manusia, khususnya dalam pendidikan anak, menjadi prioritas utama dalam kebijakan di negara-negara berkembang. Dengan mengatasi tantangan dalam sektor pendidikan, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin dapat terbebas dari kemiskinan yang mungkin diwarisi dari orang tua mereka. Oleh karena itu, program bantuan tunai memainkan peran krusial dalam memajukan pendidikan anak. Penelitian ini secara khusus mengkaji dampak dari program KIP terhadap partisipasi pendidikan tinggi (Listiyanto, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Di Indonesia, meskipun berbagai program bantuan pendidikan telah diluncurkan, angka putus sekolah masih menjadi fenomena yang memprihatinkan. Salah satu permasalahan yang juga dihadapi Indonesia saat ini adalah rendahnya partisipasi individu dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi adalah Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). PIP diperkenalkan dengan mekanisme penyaluran yang lebih modern melalui kartu KIP-Kuliah, diharapkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Namun, terdapat berbagai faktor lain

seperti status ekonomi keluarga, lokasi geografis, dan tingkat pendidikan orang tua yang juga mempengaruhi partisipasi pendidikan tinggi. Kondisi ideal yang diharapkan adalah dimana setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosio-ekonomi, dapat mengakses pendidikan secara penuh hingga tingkat menengah atas penting untuk dilakukan analisis pengaruh KIP dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi, serta memahami faktor-faktor lain yang berperan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari Kartu Indonesia Pintar terhadap probabilitas partisipasi pendidikan perguruan tinggi di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi pendidikan perguruan tinggi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh dari Kartu Indonesia Pintar terhadap probabilitas partisipasi pendidikan perguruan tinggi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi pendidikan perguruan tinggi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting, baik dari segi kebijakan, akademis, sosial, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah manfaat-manfaat tersebut:

1. Manfaat Empiris :
 - a. Menyediakan data empiris yang dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 - b. Membantu dalam perencanaan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan efisien untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa bantuan pendidikan seperti KIP benar-benar dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi semua anak Indonesia.

2. Manfaat Akademis:

- a. Menambah literatur ilmiah terkait dengan studi dampak program bantuan pendidikan terhadap partisipasi pendidikan.
- b. Memberikan metodologi dan hasil analisis yang bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pendidikan dan kebijakan sosial.

